



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP RI DAN RDP DENGAN GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA UTARA, DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI
ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN RI, BUPATI SAMOSIR SERTA RDPU DENGAN PARA
PENYELAMAT LINGKUNGAN, DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

- Tahun Sidang : 2013 -2014
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI, Bupati Samosir serta RDPU dengan Para Penyelamat Lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari,Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2013
Pukul : 14.00 s.d 19.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua : Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM
Sekretaris : Dr. Dewi Barliana Soetisna, M.Psi
Hadir Anggota : 35 dari 50 Anggota Komisi VII DPR-RI orang izin.
Hadir Pemerintah : Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI, Bupati Samosir serta RDPU dengan Para Penyelamat Lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- Acara : " Pelaksanaan Fungsi Pengawasan"
1. Permasalahan Perusakan Lingkungan akibat Penebangan Pohon di Hutan Alam Tele di Kabupaten Samosir;
2. Pencemaran Air Danau Toba oleh PT Aquafarm Nusantara;
dan
3. Permasalahan Pelestarian Lingkungan.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja dan RDP Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 dibuka pukul 14.00 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM dan dinyatakan terbuka untuk umum.

APR 02/10 -2K13
Z

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan RI, Bupati Samosir serta RDPU dengan Para Penyelamat Lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI menyetujui perlunya pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS), PT. Aqua Farm, dan PT. Alegrindo Nusantara dengan memperhatikan kondisi kerusakan lingkungan di kawasan Danau toba.
2. Komisi VII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup RI, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi untuk menghentikan sementara kegiatan operasi PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS), PT. Aqua Farm, dan PT. Alegrindo Nusantara di kawasan hutan Tele, di Kawasan Danau Toba Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Karo.
3. Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk segera melakukan audit lingkungan kepada PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS), PT. Aqua Farm, dan PT. Alegrindo Nusantara di kawasan danau Toba secara menyeluruh.
4. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup RI untuk membuat gerakan nasional penyelamatan danau Toba.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 19.00 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2013

**PIMPINAN KOMISI VII DPR-RI
KETUA,**



DRS. IR. H. SUTAN BHATOEKANA, MM